DPUPKP
BANTUL

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

www.dpupkp.bantulkab.go.id

(0274) - 367310

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berada di Lobby Ruang Utama dan telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu ber-AC, TV/monitor, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

"Ruang Informasi pada PPID Pelaksana DPUPKP telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai serta nyaman bagi para pemohon informasi"

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

a. Meja layanan langsung di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
b. Fax. (0274) 367310
c. E-mail : dinas.pupkp@bantulkab.go.id
d. Telepon : (0274) 367310
e. Website DPUPKP Kabupaten Bantul : dpupkp.bantulkab.go.id

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah numenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2024 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

RUANG LAYANAN
acer

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	11	11	0	-	5-30 menit	-
Februari	3	3	0	-	5-30 menit	-
Maret	7	7	0	-	5-30 menit	-
April	3	3	0	-	5-30 menit	-
Mei	10	10	0	-	5-30 menit	-
Juni	5	5	0	-	5-30 menit	-
Juli	6	6	0	-	5-30 menit	-
Agustus	4	4	0	-	5-30 menit	-
September	8	8	0	-	5-30 menit	-
Oktober	13	13	0	-	5-30 menit	-
November	9	8	1	-	5-30 menit	Bukan Kewenangan
Desember	10	10	0	-	5-30 menit	-
JUMLAH	**89**	**88**	**1**	**-**	**5-30 menit**	**-**

"Terdapat 89 Permohonan Informasi dan terdapat 1 permohonan tidak dapat diterima dan dipenuhi karena bukan menjadi kewenangan dari DPUPKP Kabupaten Bantul "

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 Permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan

E. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. **Kendala eksternal**

   Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. **Kendala internal**

   Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024, antara lain:

   a. Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus dalam satu kegiatan.
   b. Belum semua SDM pada Dinas PUPKP mengetahui tentang PPID Pelaksana dan ketugasannya

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

G. Monev Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2024 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik dan mengumumkannya ke publik.

Berdasarkan pemeringkatan hasil monev tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Peringkat 65 dari 155 badan publik pada Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan nilai 82 dan masuk kategori badan publik “Menuju Informatif”. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau meningkatkan peringkat dimaksud. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil monev keterbukaan informasi public Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami fluktuasi naik turun. Selengkapnya, hasil monev seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada DPUPKP Tahun 2017 – 2024

No	Uraian	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai	43,95	-	6,97	98,38	93,45	96,03	93	82
2	Kategori	-	-	-	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Menuju Informatif
3	Peringkat	9	-	119	4	32	35	59	65
4	Jumlah OPD yang mengikuti Monev	n/a	n/a	n/a	n/a	162	162	162	155

Berdasarkan hasil monev tersebut, menjadi tantangan ke depan bagi PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan peringkat sebagai upaya untuk menjadi badan publik yang informatif.

H. Kegiatan Tahun 2024

Tabel 4. Kegiatan PPID Pelaksana DPUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola Konten Website PPID	Januari – Desember
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Setiap Bulan Sekali
3	Mengikuti Penguatan PPID Pelaksana Se Kabupaten Bantul Dengan Narasumber dari KID DIY	21 Februari 2024
4	Mengikuti Sosialisasi SE. Bupati Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Di Kabupaten Bantul	7 Maret 2024
5	Mengikuti Public Hearing Raperda Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	19 April 2024
6	Mengikuti Evaluasi Standar Operasional Prosedur Layanan Aduan Masyarakat	13 Mei 2024
7	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2024	10 Juli 2024
8	Mengikuti Workshop Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi	23 Juli 2024

No	Kegiatan	Pelaksanaan
9	Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Keamanan Computer Security Incident Response Team (CISRT)	12 Agustus 2024
10	Mengikuti Desk Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Dari Komisi Informasi Daerah DIY	21 Agustus 2024
11	Pencermatan Pengisian SAQ dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup DPUPKP Kabupaten Bantul	6 September 2024
12	Mengikuti Finalisasi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik	9 September 2024
13	Mengikuti Pembinaan Admin Publikasi OPD	10 September 2024
14	Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul	13 Desember 2024
15	Penyusunan Laporan PPID Pelaksana Tahun 2024	31 Desember 2024

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dan memacu kami untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DPUPKP BANTUL

JIMMY ALRAN M. SIMBOLON, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790612 200212 1 002

Bantul, 20 Januari 2024
Ketua PPID Pelaksana,

JIMMY ALRAN M. SIMBOLON, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19790612 200212 1 002